

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Padang merupakan kota paling besar yang berada di pesisir barat pulau Sumatera. Padang merupakan ibukota provinsi di Sumatera Barat. Padang mempunyai wilayah seluas 694,96km<sup>2</sup> dan mempunyai ketinggian 1.853mdpl. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014 Padang berpenduduk 1.000.096 jiwa. Kota Padang diketahui sebagai kota inti dari Pengembangan wilayah yaitu metropolitan palapa.

Padang dikenal kawasan orang rantau minangkabau, ber awal mula dari perkampungan nelayan yang terletak dimuara Batang Arau seiring perkembangan zaman kemudian berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai ditandai setelah masuknya Belanda dibawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Padang. Pada tanggal 7 Agustus 1669 ditetapkan menjadi hari jadi kota Padang ditandai dengan terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC selama penjajahan Belanda dan kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke 22 kota Padang berkembang mengeksport batu bara dan semen yang mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur.

Kota Padang merupakan pusat perekonomian dengan jumlah pendapatan perkapita tertinggi di Sumatra Barat. Kota Padang menjadi pusat pendidikan dan kesehatan diwilayah Sumatera bagian Tengah ditopang dengan adanya keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan sebagai kota Sembilan Budaya. Kota Padang dikenal masyarakat dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya, dan setiap tahunnya kota Padang menyelenggarakan festival untuk menunjang sektor kepariwisataan yang diharapkan banyak masyarakat lebih mengetahui tentang kota Padang. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya di kenal dengan etnis Minangkabau dan kota Padang mempunyai masakan khas yang dikenal sebagai masakan Padang.

Untuk mengembangkan kota Padang, Pemerintah kota Padang juga mempunyai banyak hubungan kerjasama luar negeri. Salah satu bentuk yang dibina oleh Kota Padang adalah kerja sama Luar Negeri *Sister City* atau mitra kota

kembar. *Sister City* sering juga di sebut *Twining City* dan dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar, dimana kerjasama *Sister City* antar kota bersifat luas, dan disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.<sup>1</sup>

Pengertian diatas lebih disukai oleh kelompok kota di Amerika Serikat yang tergabung dalam '*Sister Cities International/SCI*' yang berpusat di Washington DC. Oleh sebab itu, istilah *Sister City* lebih sering digunakan di Amerika Serikat (USA) dan negara sesuai dengan aliannya di berbagai benua di dunia. SCI didirikan pada tahun 1956 yang disebut sebagai bagian dari '*The National League of Cities*' yang kemudian memisahkan diri dan menjadi semacam NGO atau korporasi non-profit pada tahun 1967.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian *Twining City* lebih banyak digunakan oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam '*Council of European Municipalities and Regions/CEMR*' di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliannya di berbagai benua. CEMR didirikan pada tahun 1951 untuk mempromosikan kerjasama luar negeri antar kota, kemudian komunitas Eropa dijadikan sebagai *driving force* untuk pertumbuhan dan pembangunan kota.<sup>3</sup>

Sementara di Indonesia istilah yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.<sup>4</sup>

*Sister City* pertamakali ada pada saat Era Globalisasi dengan membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berakhir pada upaya agar dunia menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, maka munculah Pemerintahan Lokal atau *Local Government*. Adanya kehadiran pemerintah lokal (*Local Government*) merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional yang

---

<sup>1</sup> List of twin towns and sister cities in Indonesia “Sister City” diakses <http://>

/List\_of\_twin\_towns\_and\_sister\_cities\_in\_Indonesia pada 28 Januari 2017 pukul 2 februari 2017

<sup>2</sup> Sister Cities International. 2010. *What Are Sister Cities?*. Washington, DC.

<sup>3</sup> Council of European Municipalities and Regions. 2007. *Twining For Tomorrow's World: Practical Handbook*. Paris, CCRE & Brussels, CEMR.

<sup>4</sup> Menteri Dalam Negeri “Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri” Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993

dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah diberbagai negara di dunia yang masing-masing saling berhubungan.

Berawal dari hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai jaringan-jaringan *Sister City* diberbagai belahan dunia yang terus meningkat di mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Pengertian *Sister City* juga sering dikenal sebagai kerjasama antar kota yang bersifat luas, dan disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

Penggunaan skema *Sister City* lebih sering digunakan untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama. Walaupun harus didiskusikan lebih dahulu dengan apa yang di maksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, diskusi terjadi antara pihak berkepentingan dengan pertukaran kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan.

Perlu diketahui bahwa prinsip *Sister City*, didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dtercantum dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: <sup>5</sup>

1. Efisiensi
2. Efektivitas (keefektifan)
3. Sinergi
4. Saling menguntungkan
5. Kesepakatan bersama
6. Itikad baik
7. Mengutamakan kepentingan nasional
8. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Persamaan kedudukan
10. Transparansi
11. Keadilan
12. Kepastian hukum

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama yang bersifat khusus dan dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dalam Peraturan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Persamaan kedudukan
2. Memberikan manfaat
3. Saling menguntungkan
4. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian
5. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan
7. Mendukung pengutamaan gender
8. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sehingga diharapkan prinsip dasar dari skema *Sister City* harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini Indonesia memiliki 47 pemerintah kota dari 34 provinsi yang sudah melakukan hubungan kemitraan *Sister City*.<sup>7</sup>

Berbagai upaya kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan hubungan ini guna memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Tetapi kenyataan skema *Sister City* ini belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan cenderung dipahami oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kota. Dilihat sejarahnya terbentuknya konsep dan skema *Sister City* di atas, merupakan skema yang diinginkan adalah hubungan kemitraan antar komunitas kota, sehingga idealnya dilakukan secara sinergi antar *Stakeholders*.

Kota Padang telah melakukan berbagai kerjasama dengan Skema *Sister City* dengan beberapa Negara diantaranya dengan Hildelsehm, Jerman pada tahun 1988 bidang pendidikan hasilnya pertukaran mahasiswa. Setelah itu dengan Chonburi, Thailand pada tahun 2010. Saat ini kota Padang sedang menjajaki kerjasama dengan kota Vung Tau Vietnam, terkait dengan kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota secara geografis dan demografis serta kesamaan potensi daerah yaitu pada bidang perikanan, pertanian, pariwisata.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar

<sup>7</sup> List of twin towns and sister cities in Indonesia diakses oleh [http://List\\_of\\_twin\\_towns\\_and\\_sister\\_cities\\_in\\_Indonesia](http://List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Indonesia) pada 28 Januari 2017 pukul 12.00 WIB

Penjajakan Kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau Vietnam telah diajukan ke Gubernur Sumatera Barat dan selanjutnya telah mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 193/5158/SJ tanggal 12 Desember 2012, yang menyatakan bahwa dalam melakukan kerjasama *sister city* diawali dengan penjajakan dan dituangkan dalam *Letter of Intent* (LoI), pengajuan permohonan persetujuan kepada DPRD dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

**“Bagaimana proses kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota Vung Tau Vietnam?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Tesis :

- a. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai suatu kerjasama *Sister City* antara kota Padang dengan kota Vung Tau di Vietnam, dengan mengulas proses pengambilan keputusan kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kota Vung Tau.
- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
- c. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat Mekanisme kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota Vung Tau
- b. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini diyakini dapat menjadi bahan telah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian *Sister City*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan berita yang sesuai dengan topik atau masalah yang dikaji. Berita tersebut dapat didapat dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka juga merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka dalam studi kasus kerjasama *Sister City* antara kota Padang dengan kota Vung Tau di Vietnam adalah sebagai berikut :

Adapun peneliti yang pertama meneliti masalah *Sister City* antara lain penelitian yang dilakukan Irdyanti dengan judul Substansi Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Kota Surabaya-Xiamen.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan Kerjasama *Sister City* atau kota kembar banyak dipengaruhi oleh adanya kesamaan secara geografis dan kegiatan kota yang dapat membuat kedua kota lebih maju sehingga terwujudnya kerjasama untuk kondisi ini diperkuat oleh adanya undang-undang mengenai kerjasama yang berkaitan dengan daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi setiap daerah yang akan melaksanakan kerjasama dengan wilayah yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, persamaan antara Surabaya dengan Xiamen antara lain adanya pelabuhan dan institut teknologi.

---

<sup>8</sup> Irdyanti. 2014. Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Kota Surabaya-Xiamen. UIN Sultan Syarif Khasim Riau.

Kerjasama ini telah menunjukkan bukti nyata, seperti di bidang perdagangan, dibukanya kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Xiamen ini telah membuka peluang pasar bagi Kota Surabaya untuk mempromosikan potensi ekonomi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan ekonomi *exchange*. Seperti kegiatan *expo*, *exhibition*, *fair*, dan lain- lain dan bagi Xiamen sendiri Surabaya adalah kota yang dapat memberikan kontribusi di bidang pendidikan, seperti pertukaran pelajar, melakukan penelitian di Universitas di Surabaya. Kota Xiamen juga menerima investasi asing di mana 24 persen di antaranya merupakan usaha bersama. Investasi yang masuk ke Kota Xiamen dimanfaatkan untuk pengembangan sejumlah industri, seperti elektronik, tekstil, farmasi, bahan bangunan, dan sebagainya.

Penelitian yang kedua dari Reni Widiani Wulandari dengan judul Implementasi *Sister Province* Propinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dibidang Pertanian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini disebutkan kerjasama *Sister Province* dari Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland di Australia dimulai dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Australia pada bagian Negara Australia untuk melakukan kerjasama dengan Negara Dunia ke Tiga pada tahun 1991.

Negara Bagian Queensland lalu mencari beberapa kota dan provinsi yang terdapat di Indonesia, di tahun 1992 Bappenas memberikan dukungan dan persetujuan dari DPRD Jawa Tengah ditandatangani kerjasama *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia. Kesamaan kondisi geografis maupun bentuk pemerintah bukan sebagai alasan terjadinya kerjasama tersebut, tetapi hanya semata-mata Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kerjasama *Sister Province* lain dengan negara manapun. Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang Pertanian, Pembangunan kota dan desa, perhubungan dan pariwisata, industri, perdagangan dan investasi, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang-bidang yang akan disetujui oleh kedua pihak.

Adapun peneliti yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maya Faridha dalam Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional tentang Kerjasama *Sister City* Surabaya dengan Verna.<sup>10</sup> Dalam penelitian, peneliti mengemukakan faktor yang menjadi latar belakang kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Reni Widiani Wulandari. 2014. Implementasi *Sister Province* Propinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dibidang Pertanian. FISIP UNDIP Semarang

<sup>10</sup> Maya Faridha. 2012. Analisis Hubungan Internasional tentang Kerjasama *Sister City* Surabaya dengan Verna. Media jurnal analisis HI volume 2 no 1.

Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra keenam *sister city* yaitu Pemerintah Kota Varna. Kerjasama *sister city* biasanya didasari oleh adanya sejumlah persamaan masing masing kota. Begitu juga dengan Kota Surabaya dan Kota Varna yang memiliki beberapa kemiripan. Kota Surabaya dan kota Varna sama-sama menjadi kota dengan pelabuhan kedua terbesar di negaranya masing-masing juga merupakan tempat markas Angkatan Laut dan Akademi Militer Angkatan Laut, kemudian sama sama memiliki fakultas kedokteran yang maju. Yang menarik dari penelitian ini adalah pertama kalinya bagi Surabaya melakukan kerjasama *sister city* dengan salah satu kota di Eropa Timur dan bagi Varna dengansalah satu kota di Asia, secara geografis kedua kota ini posisinya sangat berjauhan.

Penelitian keempat adalah penelitian Khoero Dara Fazra dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT ) pada tahun 2008-2015).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bogor bekerjasama dengan Nanning melalui kerjasama *sister city*. Dalam bidang sistem perpolitikan, diterapkannya sistem komunis di RRT dengan tegas untuk masyarakatnya. Karakteristik perpolitikan di RRT yang sangat sentralistik pada pemerintahan. Yang menyebabkan satu- satunya institusi yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada, lantas bagaimana proses kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning yang memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan yang berbeda. Kabupaten Bogor yang tidak memiliki daerah keistimewaan seperti Yogyakarta dll. Begitu pula dengan Nanning yang negaranya menganut sistem sentralistik.

Namun pada kenyataannya, fenomena baru kerjasama internasional dengan konsep *sister city*, hampir menghilangkan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah lain antar negara. Pemerintah daerah menjadi aktor baru dalam kerjasama internasional. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan menjalin kerjasama internasional tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat.

---

<sup>11</sup> Khoero Dara Fazra. 2014. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT ) pada tahun 2008-2015). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Kerjasama *sister city* yang berawal dari tahun 2006-2008 hingga kerjasama tersebut di perpanjang kembali dengan penandatanganan LOL yang di sepakati di tahun 2015. Sehingga ditemui pendorong dan penghambat mengingat hal yang telah disetujui kedua belah pihak dalam penandatanganan surat perjanjian yang ditandatangani dalam kerjasama tersebut, memunculkan bagaimana proses kerjasama tersebut bisa dilakukan dari tahun 2006 hingga mendapatkan persetujuan pada tahun 2008.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah harus melalui lima tahap tersebut untuk mengadakan kerjasama *Sister City*. Kelima tahapan tersebut merupakan prosedur resmi yang menjadi proses kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, proses yang sangat memakan waktu sering menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang akan melaksanakan kerjasama *Sister City*.

Masalah prosedur menjadi hambatan bagi terlaksananya kerjasama tersebut. Hal ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning. Masalah birokrasi dan prosedural menjadi masalah bagi terlaksananya kerjasama *Sister City*.

Dalam rangka menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut, tahapan-tahapan tersebut juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan dalam empat tahapan besar guna memotong masalah procedural tersebut. Tahap pertama adalah peninjauan atau pengenalan, Tahap yang kedua, yaitu pembahasan draft MoU, Tahap yang ketiga, yaitu penandatanganan MoU, Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan.

Penelitian yang kelima adalah penelitian dengan judul Peluang Dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung Dengan Hamamatsu (2014-2015) oleh Rizki Tegar Sembada.<sup>12</sup> Dalam penelitian Kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, kota Bandung yang tidak terlalu melihat kesamaan kulture atau budaya atau kesamaan lainnya akan tetapi lebih dilihat dari segi peluang dan *benefit* yang akan Kota Bandung dapatkan dari kerjasama dengan Kota Hamamatsu. Kerjasama yang dilakukan Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu Jepang yang memiliki peluang besar dalam peningkatan Kerjasama dari LoI ke MoU dilihat dari sejarah kota tersebut serta prospek kerjasama yang telah mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Rizki Tegar Sembada. 2016. Peluang Dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung Dengan Hamamatsu (2014-2015). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kota Bandung memiliki alasan yang mendasar dan mengakar dalam perjalanannya melakukan kerjasama dengan Kota Hamamatsu, alasan ini yang didasari dan diyakini mengapa Kota Bandung ingin melakukan Kerjasama sister city dengan Hamamatsu berawal ketika jaman perang pasifik ketika tentara Jepang asal Kota Hamamatsu ditolong oleh warga Bandung, hal kecil namun cukup berpengaruh dalam sejarah kerjasama antara kedua Kota tersebut.

Melihat dari sisi Historis yang begitu lama dan penuh dengan kenangan, hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Kota Bandung dan Kota Hamamatsu memutuskan bekerjasama dalam hal yg lebih luas lagi dalam ranah *sister city* yang dimana diharapkan mampu memperluas kerjasamanya dalam berbagai bidang atau sektor yang direncanakan sebagai berikut :

1. Pelatihan UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas produk kreatif Kota Bandung. Dalam pelatihannya Kota Hamamatsu memberika kepelatihan bagaimana cara membuat sebuah makanan dalam produk instant, kita tau bahwa Jepang terkenal akan Mie Ramennya, di Jepang Ramen dapat dijumpai dalam bentuk Cup. Maka dalam kepelatihanya Masyarakat Kreatif Bandung diberikan cara dalam membuat makanan instant dalam bentuk cup, seperti Bakso Cuanki dan Seblak instant yang sudah dapat dijumpai dalam bentuk cup.
2. *Sharing Best Practices* Manajemen persampahan, air dan limbah. Kota Hamamatsu memberikan penyuluhan serta kepelatihan cara mememanajemen sampah yang ada di Kota Bandung, mengingat dari tahun ke tahun sampah selalu menjadi indikasi masalah yang sangat mengawatirkan di Kota Bandung, image Kota Bandung sebagai Kota Paris Van Java sedikit hilang akibat banyaknya sampah yang menggunung. Kemudian dengan masalah air dan limbah, bagaimana Perwakilan Kota Hamamatsu memberikan kepelatihan cara mendaur ulang limbah sebagai barang recycle agar dapat digunakan lagi serta dapat dijual dan menjadi mutu kreatif masyarakat Kota Bandung.
3. Optimalisasi Peran KADIN dalam memfasilitasi Kerjasama antar pelaku usaha kedua kota. Peran KADIN sangat penting mengingat sebagai fasilitator antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, dimana pelaku usaha dari Hamamatsu ingin berinvestasi di Kota Bandung harus melalui KADIN. Disinilah Kebijakan serta Birokrasi KADIN harus benar-benar terstruktur

agar Kerjasama dalam bidang investasi dapat lancar dan menguntungkan kedua belah pihak.

4. Pertukaran Pemuda dan Akademisi untuk percepatan perwujudan masyarakat unggul dan mandiri. Program ini dilakukan oleh Kota Bandung dalam hal pendidikan, SMA 5 Bandung dipilih sebagai wakil pelajar yang akan diberangkatkan dalam program pertukaran pemuda di Kota Hamamatsu, dan wakil dari Mahasiswa dipilihlah beberapa Mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung dalam pertukaran Akademisi di Kota Hamamatsu guna memunculkan masyarakat yang unggul dan mandiri bagi Kota Bandung sendiri.
5. Misi Promosi Tourism Kota Bandung dari Dinas Budaya dan Pariwisata. Pada tahun 2015 Perwakilan Kota Hamamatsu berkunjung ke Kota Bandung guna membahas Bidang Kerjasama Kebudayaan, mengenai tourism Kota Bandung. Dan direspon baik oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan akan ditindaklanjuti dengan kunjungan balasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ke Kota Hamamamtsu pada tahun 2016 ini dengan membahas Misi Promosi Tourism.

Jalinan persahabatan Bandung – Hamamatsu diawali ketika ada tentara jepang yang ditolong oleh warga Bandung ketika terjadi Perang Pasifik dimana Jepang dikalahkan oleh sekutu sehingga harus meninggalkan Indonesia. Sejak peristiwa itu, tentara Jepang tersebut tetap menjalin hubungan baik dengan warga Bandung yang telah menolongnya. Jalinan persahabatan itu berkembang menjadi persahabatan antara masyarakat Bandung dan Hamamatsu.

Terlihat jelas diatas bahwa hubungan serta sejarah yang cukup lama antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu merupakan awal dimana suatu hubungan kerjasama antara kedua kota itu terjalin, ditambah dengan direalisikannya Kerjasama *Sister City* pada tahun 2014 menambahkan bahwa kerjasama kedua kota sangatlah penting bagi kedua belah pihak terlihat keseriusan kedua kota tersebut dengan melihat *action plan* dari segala bidang kerjasama guna memajukan dan memberikan bagi kedua kota.

Dari data pembandingan diatas dapat dilihat masing-masing kota memiliki persamaan dan perbedaan untuk melakukan kerjasama *Sister City* dengan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dan Kota Vung Tau. Persamaanya dimana kerjasama dilakukan atas dasar kesamaan karakteristik antara dua kota dan sama-sama tujuan untuk mencapai kepentingan yaitu mengembangkan potensi kota. Selain itu mekanisme pengambilan keputusan dilakukan sesuai Permenlu no.09/A/KP/XII/2006/01 yaitu melalui persetujuan DPRD meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekertaris Negara dan Tahapan kerjasama *Sister City* juga. Perbedaannya sendiri dari data pembandingan diatas bahwa terkadang setiap daerah mempunyai aturan perundang-undangan daerah sendiri yang mengatur kerjasama *Sister City* contohnya aturan harus mempunyai kesamaan karakter kota atau tidak. Perbedaan lainnya adalah aktornya contohnya kota sama kota, provinsi dengan provinsi. Kerjasama *Sister City* Padang dengan Kota Vung Tau sendiri dilakukan karena adanya kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota secara geografis maupun demografis dan kesamaan potensi kota seperti perikanan, pertanian dan pariwisata dan alasan lain karena keinginan kedua kota sama-sama ingin mengembangkan potensi kota seperti ekonomi, Sains dan Teknologi, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan.

#### **E. Kerangka Teori/konseptual**

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar dua negara atau lebih yang melintasi batas yurisdiksi suatu negara. Dengan adanya perubahan lingkungan internasional yang di tandai dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan permasalahan yang di hadapi menjadi semakin kompleks, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menggunakan beberapa konsep dan teori sebagai penjabarannya, konsep – konsep dan teori tersebut antara lain:

##### **a. Konsep *Sister City***

*Sister City* atau kota bersaudara merupakan konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya juga memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Pada dasarnya tujuan utama kerjasama antara kota dari negara yang berbeda adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota disatu negara dengan masyarakat kota di negara lain yang disebut sebagai *people to people diplomacy*. Selain itu kerjasama *Sister City* juga dapat dijadikan trobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi disamping untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada masing-masing kota. Kerjasama *sister city* atau kota kembar disini dapat diartikan sebagai hubungan kemitraan antara suatu kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya.

Di Eropa program kerjasama ini dikenal dengan *Twin Towns*, *Friendship Towns*, di Jerman dikenal dengan *Partner Towns (Partnerstadte)*, di Amerika Utara dan Australia dan Asia dikenal dengan *Sister City* dan dinegara-negara bekas Soviet dikenal dengan *Brother cities*. Program kerjasama internasional *sister city* ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membangun kerjasama menyeluruh pada tingkat kota, memajukan kebudayaan kota, serta mendorong perkembangan ekonomi pada kota tersebut. Dan yang menjadi tujuannya yaitu:

- a. Memperkuat kerjasama antar kota-kota yang ada didunia
- b. Menyediakan kesempatan bagi para pejabat kota dan penduduk untuk merasakan
- c. Menjelajahi kebudayaan lain dalam kerjasama masyarakat jangka panjang
- d. Menciptakan keadaan yang membuat perkembangan ekonomi dan masyarakat dapat diimplementasikan dan diperkuat
- e. Merangsang lingkungan yang masyarakatnya berusaha belajar, bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah bersama secara kreatif dalam timbal balik budaya, pendidikan, perkotaan, bisnis, profesi, dan pertukaran secara teknik dan proyek-proyek
- f. Mengkolaborasikan organisasi-organisasi di dunua dan yang berbagi tujuan serupa.

Kerjasama *Sister City* ini dikonsep dengan unik dan memiliki dua jalan yaitu memberi dan menerima segala hal yang didapat dari kedua belah pihak. Program ini mengarah pada hubungan yang terencana dan berkelanjutan antara kota-kota yang

melakukan program kerjasama ini. Kerjasama ini memacu interaksi diantara orang-orang di kota yang berbeda negara dan budaya.<sup>13</sup>

Konsep *Sister City* inilah yang kemudian digunakan kota Padang untuk membuka kerja sama dengan Vung Tau karena adanya kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota baik secara letak geografis dan demografis dan kesamaan pada potensi kota. Dimana kedua kota ini sama-sama terletak dipesisir pantai, sama-sama sebagai ibu kota provinsi, sama-sama padat penduduk dan sama-sama mempunyai potensi yang sama di bidang perikanan, pertanian, pariwisata, adanya kesamaan secara letak geografis itu juga mengakibatkan sebagian besar penduduk kota tersebut mempunyai mata pencaharian yang sama. Adanya persamaan antara dua kota ini diharapkan Kota Padang dan Kota Vung Tau dapat mengembangkan potensi kota seperti pada bidang ekonomi, sains dan teknologi, perikanan, pertanian dan peternakan, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan dan nantinya diharapkan dapat melakukan perluasan kerjasama dibidang lain.

Pelaksanaan Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau dengan maksud dan tujuan dalam rangka saling menguntungkan bagi pembangunan kedua kota. Tujuan pelaksanaan kerjasama dengan skema *Sister City* ini secara spesifiknya adalah ;

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah

## **b. Teori Kebijakan Publik**

Dalam bahasa inggris kebijakan publik dikenal dengan istilah *public policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan sering diartikan sebagai rangkaian

---

<sup>13</sup> [www.sister-cities.org.nz/Editable/home/index.shtml](http://www.sister-cities.org.nz/Editable/home/index.shtml) diakses pada tanggal 29 Januari 2017

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Ide “kebijakan publik” mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang merupakan bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi dengan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.<sup>14</sup> Kebijakan publik juga menitikberatkan pada “publik dan problem-problemnya.”<sup>15</sup>

Kebijakan publik merupakan studi tentang “apa yang harus dilakukan pemerintah, dan mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, serta apa akibat dari tindakan tersebut”.<sup>16</sup> Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Lingkup dari studi kebijakan public itu sendiri sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dapat dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti yang tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Proses pembuatan kebijakan publik juga merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wayne Parsons, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 15

<sup>15</sup> Dewey, Jhon. *The public and its problem*, Holt, New York, hal 29

<sup>16</sup> Dye, Thomas. R. *What Governments do, why they do it, what difference it makes*, University Alabama Press, Tuscaloosa, Ala. Hal. 1

<sup>17</sup> Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Jogja: Gadjah Mada University Press, 2003). Hal. 24 - 25

1. Penyusunan Agenda dapat diartikan juga dengan perumusan masalah.
2. Formulasi Kebijakan dapat diartikan dengan membentuk beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang paling baik, yaitu meminimalisir kendala / penolakan kebijakan.
3. Adopsi Kebijakan dapat diartikan dengan Menawarkan beberapa alternatif kebijakan dan hanya satu kebijakan terbaik yang diterima mayoritas dukungan.
4. Implementasi Kebijakan dapat diartikan dengan pemantauan hasil dan dampak yang diperoleh dari kebijakan.
5. Evaluasi Kebijakan merupakan kesimpulan dari tahap evaluasi, apakah sesuai kebijakan dengan fakta yang ada atau malah perlu adanya pembenahan atau pergantian kebijakan karena tidak lagi relevan dengan fakta yang ada.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan aplikasi pada kerangka dasar pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka dapat di hasilkan kesimpulan sementara:

Kota Padang melakukan kerjasama *Sister city* dengan kota Vung Tau berdasarkan alasan kesamaan karakteristik antara kota Padang dengan kota Vung Tau. Proses pembuatan kebijakan kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan kerjasama kota Padang dengan kota Vung Tau.
2. Tahap perizinan yaitu tahapan Pemerintah kota Padang meminta persetujuan DPRD meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekertaris Negara.
3. Tahap pembuatan LoI yaitu tahap perencanaan LoI sampai penandatanganan LoI *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau.
4. Tahap pembuatan MoU yaitu tahap perencanaan MoU sampai Penandatanganan MoU.
5. Rancangan MoA yang merupakan tindak lanjut dari MoU sesuai isi dari MoU.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang berguna dalam menjelaskan sebuah fenomena dengan dibantu oleh Kerangka Teori atau Konsep.

### **2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan kota Vung Tau, Maka jangkauan penelitian dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2016.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu: dokumen (gambar, foto, jurnal, buku, laporan tertulis), Arsip (arsip yang dimiliki oleh Kota Padang secara resmi mengenai kerjasama *Sister city* dengan Kota Vung Tau ), observasi, wawancara.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan di jelaskan menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** membahas tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II** membahas tentang Kerjasama *Sister City* yang telah dilakukan oleh Kota Padang sebelum bekerjasama dengan Kota Vung Tau, pada sub-sub bab ini berisi tentang Sejarah kota Padang, logo Kota Padang, letak geografi, demografi, iklim, perekonomian, dan pemerintahan Kota Padang, Undang-undang yang mengatur Kerja sama *Sister City* dan Kerja sama *Sister City* yang telah dilakukan Kota Padang.

**BAB III** membahas tentang Persamaan Karakteristik antara Kota Padang dengan kota Vung Tau. Bab ini mendeskripsikan tentang persamaan letak geografi, demografi, Kota Padang dengan Vung Tau dan persamaan potensi kota seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.

**BAB IV** membahas tentang tahapan proses pembuatan kebijakan Kota Padang melakukan kerja sama *Sister City* dengan Kota Vung Tau. Bab ini berisi tentang penjelasan tentang Mekanisme kerjasama *Sister city* kota Padang dengan Kota Vung Tau dari tahap perencanaan, tahap penandatanganan LoI, tahap penandatanganan MoU serta keefektifan kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau. .

**BAB V** membahas tentang kesimpulan. Bab ini merupakan berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.